Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara di Bidang Telekomunikasi

Sigit Haryadi

Institut Teknologi Bandung

Januari 2018

Paper DOI: 10.17605/OSF.IO/YTWMX

CITATION: Haryadi, Sigit. "Prinsip - Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara Di Bidang Telekomunikasi." Open Science Framework, 22 Jan. 2018. Web. <https://osf.io/32g65/>

3.1. Perlunya Engineer Mengetahui Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara

- 1) Meskipun prinsip penyusunan kebijakan negara merupakan bidang kajian di dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, tetapi sangat penting diketahui oleh engineer maupun sarjana/doctor bidang-bidang lain, karena kita semua adalah warganegara suatu bangsa yang wajib mengetahui kebijakan-kebijakan negara maupun proses penyusunannya, khususnya pada mata kuliah "Ekonomi, Bisnis, Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi", adalah yang terkait dengan Kebijakan Negara di Bidang Telekomunikasi.
- 2) Prinsip – prinsip penyusunan kebijakan negara bukan hanya penting untuk orang yang bekerja di pemerintahan dan para administrator publik, tetapi juga diperlukan oleh administrator (Direktur, Manager dan lain-lain) maupun pemilik suatu perusahaan, yaitu dengan cara mengganti kata "kepentingan public" dengan kata "kepentingan perusahaan".

3.2. Sejarah Ilmu Administrasi Negara (Public Administration) di Dunia

- i. Dikotomi Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi (1900 – 1926)
 - Dipelopori oleh Frank J. Goodnow. Pemerintahan mempunyai dua fungsi berbeda: (a) Fungsi politik : perumusan kebijakan negara dan (b) Fungsi administrasi: pelaksanaan kebijakan negara
- ii. Prinsip-prinsip ilmu Administrasi (1927 – 1937)
 - W.F. Willoughby. Menyatakan bahwa ada suatu prinsip administrasi yang berlaku umum untuk segala macam organisasi. Luther H. Gulick & Lyndall Urwick: Prinsip administrasi adalah POSDCORB (Planning-Organizing-Staffing-Directing-Coordinating-Reporting-Budgeting)

- iii. Ilmu Administrasi Negara merupakan bagian ilmu Politik (1950– 1967)
 - Administrasi Negara sebagai bagian Ilmu Politik, lalu diabaikan oleh Ilmu Politik
- iv. Ilmu Administrasi Negara bagian Ilmu Administrasi (1956 – 1970)
 - Ilmu Administrasi Negara menggabungkan diri dengan Ilmu Administrasi. Kemudian hari Ilmu Administrasi terpecah menjadi dua stream: (a) Ilmu administrasi negara, administrasi niaga, sosiologi dan ilmu jiwa sosial: fokusnya mempelajari tingkah laku organisasi: (b) Ilmu Manajemen mendekatkan diri dengan Ilmu ekonomi yang lebih mempercayabantuan ilmu statistik, komputer dan analisis sistem
- v. Ilmu Administrasi Negara sebagai cabang ilmu tersendiri (1970 -)
 - Nicholas Henry. Focus Administrasi Negara adalah teori organisasi dan ilmu manajemen dan locusnya adalah kepentingan dan masalah publik (public interest dan public affairs)

3.3. Administrasi Negara Sebagai Proses Politik

- Meskipun dikotomi antara politik dan administrasi secara teoritis masih dianut, pada prakteknya lembaga-lembaga pemerintahan dimanapun juga tidak memisahkannya dan pemerintah di manapun selalu menjalankan dua peran kembar, yaitu merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan
- Jika peran perumusan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif tidak mampu sepenuhnya dijalankan, maka lembaga eksekutif mengambil alih sebagian peran perumusan kebijakan, khususnya di Indonesia lembaga eksekutif yang menjalankan ini adalah Kementerian Kominfo. Tetapi Kominfo tidak berdiri sendiri, karena dalam menyusun kebijakannya harus memperhatikan hasil kajian dari Lembaga Negara lain, seperti Bappenas, LIPI dan lain-lain, dan juga supaya kebijakannya bisa terimplementasi dengan baik, maka harus mempertimbangkan peraturan dan kebijakan dari Kementerian Keuangan.

3.4. Kebijakan Negara dan Kepentingan Publik

- Tujuan utama dari kebijakan Negara adalah untuk mendukung tercapainya kepentingan public.
- Ronald J. Schmidt dan George Frederick Goeri (1980): Menekankan tentang pentingnya pendidikan politik bagi public administrator, agar mereka menjadi public-spirited-citizen yang lebih peka dan selalu berorientasi pada kepentingan publik

3.5. Jenis – Jenis Administrator Publik

Ada tiga jenis administrator public, dimana idealnya adalah terdiri dari orang dan kelompok orang yang berbeda, tidak ada yang merangkap posisinya:

- i. **Birokrat:** pelaksana kebijakan yang dibuat “superior politiknya”. Di negara demokratis, seorang birokrat sejati tidak bermain politik dan tidak merangkap sebagai professional, sekalipun dia mempunyai latar belakang sebagai politikus dan tau sebagai seorang professional. Di bidang Telekomunikasi di Indonesia, birokrat adalah

Presiden dan Menteri-menterinya, antara lain Menteri Kominfo. Dalam hal ini anggota BRTI adalah termasuk birokrat, bukan professional.

- ii. **Pemain Politik:** administrator publik yang lebih memainkan peran sebagai pembuat kebijakan, Di bidang Telekomunikasi di Indonesia pemain politik berada di partai-partai politik, anggota DPR & DPD, serta Organisasi kemasyarakatan seperti Mastel dan lain-lain.
- iii. **Profesional:** mempunyai kemampuan teknis menjalankan tugas administrasi maupun politik. Di bidang Telekomunikasi di Indonesia, para professional ada di Kampus dan tenaga ahli / konsultan.

3.6. Pengertian Kebijakan Negara

Dalam hal ini, engineer tidak perlu terlibat, maka di sini hanya dikutip pendapat para ahli ilmu Administrasi negara:

- i. Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan: "a projected program of goals, values and practices"
- ii. Carl J. Frederick: a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose
- iii. James E.Anderson: "a Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"
- iv. Thomas R. Dye: "Whatever governments choose to do or not to do"
- v. George C. Edwards dan Ira Sharkansky: is what government say and do, or not to do. It is the goals or purposes of government programs.
- vi. David Easton: "the authoritative allocation of values for the whole society"

3.7. Implikasi Kebijakan Negara

Implikasi kebijakan negara adalah:

- i. Bentuknya adalah penetapan tindakan pemerintah, misalkan pada bidang telekomunikasi bisa berbentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.
- ii. Mengeluarkan pernyataan untuk melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu
- iii. Kebijakan negara tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata
- iv. Kebijakan negara mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- v. Kebijakan Negara harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

3.8. Pembuat Keputusan vs Perumus Kebijakan

Perbedaan antara pembuat keputusan dan perumus kebijakan adalah:

- a. Pengambilan keputusan (***decision making***): pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari berbagai alternatif yang ada dan selesai, dilakukan oleh para birokrat
- b. Perumus kebijakan (***policy making***): merupakan proses pengambilan keputusan secara terus menerus tidak pernah selesai, dilakukan oleh para pemain politik dan professional.

3.9. Faktor- faktor Buruk yang mempengaruhi perumusan kebijakan Segala Akibatnya:

Faktor – factor buruk yang harus diminimalisasi karena bisa mempengaruhi perumusan suatu kebijakan adalah

- I. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar yang terjadi umumnya karena adanya administrator public yang meraih posisinya dengan dukungan suatu kelompok tertentu sehingga tidak bisa berbuat adil kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya.
- II. Adanya pengaruh kebiasaan lama, yang terjadi karena gaya pemerintahan konservatisme
- III. Adanya pengaruh sifat pribadi, yang terjadi karena adanya administrator public yang memiliki egoisme yang terlalu tinggi.
- IV. Adanya pengaruh dari kelompok luar adanya suatu ***bargaining posisi politik***
- V. Adanya pengaruh keadaan masa lalu yang terlalu kuat mendominasi situasi sekarang

Kesalahan yang harus dihindari dalam perumusan kebijakan negara:

- I. Cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness)
- II. Keyakinan bahwa masa depan PASTI akan mengulangi masa lalu
- III. Terlampaui menyederhanakan sesuatu
- IV. Terlampaui menggantungkan pada pengalaman satu orang
- V. Dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan
- VI. Tidak berani melakukan percobaan
- VII. Keengganan untuk membuat keputusan

3.10. Model Pembuatan Keputusan dan Model Perumusan Kebijakan

Ada beberapa model pembuatan keputusan

- i. Pure Rationality Model
- ii. Economically rational model
- iii. Sequential – decision model
- iv. Incremental model
- v. Satisfying model
- vi. Extra rational model

- vii. Optimal model

Ada beberapa model perumusan kebijakan:

- i. Model Institusional
- ii. Model Elit – Massa
- iii. Model kelompok
- iv. Model Sistem – politik
- v. Model rational comprehensive
- vi. Model Incremental
- vii. Model Mixed Scanning

3.10.1. Model Institusional

Model Institusional merupakan model paling tradisional dengan fokus pada struktur organisasi pemerintah, dimana struktur organisasi pemerintah menganut trias politica, dimana yang dimaksudkan pemerintah adalah lembaga Legislatif + Eksekutif + Yudikatif, jadi yang dimaksudkan sebagai “pemerintah” adalah **bukan** hanya lembaga eksekutifnya saja, dimana pemerintahan memiliki ciri-ciri:

- i. Lembaga pemerintah memberikan legitimasi bahwa kebijakan negara dipandang sebagai kewajiban hukum yang harus ditaati oleh semua warga negara
- ii. Kebijakan negara bersifat universal
- iii. Hanya pemerintah yang memonopoli kebijakan dan selalu memaksakan sahnya suatu kebijakan dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya

3.10.2. Model Elit – Massa

Di negara kurang demokratis, dianut model Elit – Massa, administrator negara sejatinya bukan sebagai abdi rakyat melainkan sekelompok kecil orang yang telah mapan, dimana negara dicirikan oleh:

- i. sikap massa yang apatis dan pasif, dan diliputi oleh kerancuan informasi yang beredar di masyarakat
- ii. Kebijakan negara ditentukan oleh sekelompok elit
- iii. Terdapat hirarki sebagai berikut: (1) Elit; (2) Pejabat Pemerintah; (3) Massa

3.10.3. Model Kelompok

Di negara yang belum lama menjalankan demokrasi, terdapat model Kelompok, interaksi antar kelompok-kelompok merupakan kenyataan politik, dimana negara dicirikan oleh

- i. Individu-individu yang memiliki kepentingan sama mengikatkan diri baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok interest yang berusaha mengajukan atau memaksakan kepentingannya pada pemerintah
- ii. Kelompok kepentingan akan semakin mempunyai arti bila terlibat dalam proses dan kegiatan politik

- iii. Menurut model ini kebijakan negara merupakan perimbangan (equilibrium) yang dicapai sebagai hasil perjuangan semua kelompok

3.10.4. Model Sistem – politik

Pada pemerintahan yang diwarnai oleh birokrat dari kalangan engineering, biasanya dianut model Sistem Politik mengacu pada konsep-konsep teori informasi (inputs – withinputs/proses – outputs – feedback), dan dicirikan:

- i. Kebijakan negara pada model ini dipandang sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dsb). Jadi kebijakan negara merupakan output dari sistem politik
- ii. Pada model ini: (1) Inputs adalah demands, support dan resources; (2) Withinputs adalah Sistem politik; (3) Outputs adalah: decisions, actions dan policies

3.10.5. Model Rational Comprehensive

Pada pemerintahan yang diwarnai oleh birokrat dari kalangan ekonomi, biasanya dianut model rational Comprehensive yang berasumsi bahwa semua tingkah laku manusia bertujuan untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, dan dicirikan oleh:

- i. Menurut model ini semua individu sebenarnya tahu tentang pelbagai alternatif yang tersedia pada suatu situasi tertentu dan juga tentang konsekuensi yang ada pada setiap alternatif.
- ii. Dalam model ini konsep rasionalitas identik dengan efisiensi. Kebijakan yang efisien menurut mereka adalah yang menyebabkan ratio antara nilai yang dicapai dengan nilai yang dikorbankan adalah positif dan paling tinggi dibanding alternatif-alternatif lain
- iii. Secara teoritis, model ini nampak baik, tetapi memiliki kelemahan, ketika para manager yang mempunyai posisi untuk merumuskan kebijakan, sekaligus melaksanakannya, ternyata tidak memiliki informasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakannya.
- iv. Yang paling berbahaya adalah jika secara sengaja dipilih kebijakan yang secara short-run nampak efektif namun secara long-run adalah negative

3.10.6. Model Incremental

Pada pemerintahan yang dipimpin oleh birokrat yang sudah lama bercokol di pemerintahan, biasanya menganut model Incremental kebijakan negara adalah merupakan kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubah/modifikasi sedikit-sedikit, yang dicirikan oleh:

- i. Model ini merupakan kritik pada model rational comprehensive yang banyak diterapkan negara-negara di dunia, dipelopori negara-negara maju dan diikuti oleh negara berkembang. Di mana terbukti bahwa kebijakan negara yang nampak baik-baik saja ketika pemimpin sedang berada di posisinya, namun meninggalkan bomb waktu di masa pemimpin penggantinya.
- ii. Kelemahan model ini adalah cenderung digunakan untuk mempertahankan status quo dan mengabaikan pada inovasi sosial

3.10.7. Model Mixed Scanning

Pada pemerintahan yang diwarnai oleh birokrasi yang merupakan kombinasi dari para ekonom dan engineer, biasanya menganut model Mixed Scanning membagi menjadi dua jenis kebijakan

- i. Keputusan yang fundamental (contextuating decisions) dilakukan menggunakan model rational comprehensive
- ii. Kebijakan non fundamental (bit decisions) dilaksanakan menggunakan model incremental

Penjelasan proses ini sebagai berikut, misal kita akan melakukan survei keadaan cuaca dunia:

- Pendekatan rasional akan melakukan survei keadaan cuaca secara keseluruhan dengan menggunakan kamera yang mampu melakukan observasi secara detil dan terus menerus sesering mungkin → ini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka model rasional dilakukan secara terbatas, observasi tidak perlu dilakukan detil, tetapi cukup untuk menghasilkan kesimpulan awal tentang wilayah tertentu yang perlu pengamatan secara detil dan terus menerus, misalnya daerah yang mungkin akan timbul topan besar.
- Lalu model inkremantal dilakukan dengan cara observasi detil dan terus menerus pada wilayah wilayah yang perlu khusus mendapat perhatian.

3.11. Proses Kebijakan Negara

Urutan proses kebijakan negara sebagai berikut:

- i. Perumusan Masalah Kebijakan Negara
- ii. Penyusunan Agenda Negara
- iii. Perumusan Usulan Kebijakan Negara
- iv. Pengesahan Kebijakan Negara
- v. Pelaksanaan Kebijakan Negara
- vi. Penilaian Kebijakan Negara

3.12. Perumusan Masalah Kebijakan Negara

- Banyak anggapan keliru, seolah masalah-masalah kebijakan sudah given, sudah siap tersaji di hadapan pembuat kebijakan → Sebenarnya, harus dicari dan diidentifikasi masalah kebijakan negara dengan susah payah barulah kemudian dapat dirumuskan masalahnya dengan benar.
- Sesuatu yang dianggap sebagai masalah bagi seseorang justru dijadikan ladang mencari benefit bagi orang lain → masalah seperti ini bukan termasuk permasalahan kebijakan negara.
- Terkait dengan kebijakan negara, suatu masalah secara formal diartikan sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ke tidakpuasan pada rakyat (public problem) dan diperlukan cara untuk menanggulangnya.

- Sebagian dari public problem dapat menjadi isu (controversial public problem), yaitu public problems yang konflik satu sama lain.
- Tidak semua private problem bisa menjadi public problem, tidak semua public problem bisa menjadi isu dan tidak semua isu dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah.
- Contoh Urutan perumusan masalah: Pengangguran terjadi di mana-mana → ini bukan masalah, melainkan gejala atau akibat dari suatu masalah → perlu dicari apa masalahnya, salah satu atau kombinasinya: (a) lapangan pekerjaan terlalu sedikit di semua tempat (b) lapangan pekerjaan sebenarnya cukup banyak, tetapi tidak match dengan kualifikasi dan ketrampilan pencari kerja, jadi masalahnya adalah pendidikan formal dan non formal (c) lapangan pekerjaan di satu tempat terlalu kecil dibanding pencari kerja, tetapi di wilayah lain lapangan kerja berlimpah, dan kekurangan tenaga kerja.

3.13. Penyusunan Agenda Negara

- Public problems sangat banyak dan kompleks → hanya sebagian kecil yang bisa memperoleh perhatian pemerintah → pilihan dan kecondongan perhatian perumus kebijakan menimbulkan the policy agenda.
- Agenda pemerintah seringkali tidak seiring sejalan dengan political demands dan juga berbeda dengan political priorities.
 - Political demands & priorities jumlahnya tidak terbatas dan menempatkan yang lebih penting di atas yang kurang penting. Agenda pemerintah jumlahnya terbatas dan harus memandang semuanya secara serius dan aktif.
 - Agenda sistemik lebih bersifat abstrak dan seringkali tidak diiringi alternatif cara-cara pemecahan. Agenda pemerintah bersifat lebih konkrit.
 - Agenda politik umumnya bersifat khusus dan baru. Agenda pemerintah bersifat umum dan mungkin merupakan isu lama atau baru.
- Public problem bisa masuk menjadi agenda pemerintah bila:
 - Terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok
 - Pemimpin memanfaatkan Kepemimpinannya untuk memperoleh dukungan politik
 - Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa
 - Adanya gerakan-gerakan protes dan kekerasan
 - Adanya isu yang dipropagandakan oleh media massa sehingga menarik perhatian masyarakat

3.14. Perumusan Usulan Kebijakan Negara

- **Langkah-langkah perumusan**
 - i. Identifikasi alternatif
 - ii. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif
 - iii. Menilai alternatif

- iv. Memilih alternatif yang terbaik

3.15. Pengesahan Kebijakan Negara

Pengesahan kebijakan negara mungkin terjadi individual process, umumnya collective process

- Umumnya perumus usulan dan pengesah kebijakan merupakan dua pihak terpisah, tetapi mungkin juga dilakukan oleh pihak yang sama
- Proses pengesahan kebijakan negara umumnya dipantau oleh berbagai pihak yang terlibat perumusan usulan kebijakan.
- Proses pengesahan umumnya didahului oleh:
 - **Persuasion**: usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain sedemikian hingga orang lain bisa merasakan usulan kebijakan tersebut juga penting bagi dirinya
 - **Bargaining**: suatu proses dimana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas melakukan tindakan penyesuaian sebagian tujuan kebijakan agar bisa diterima oleh kedua belah pihak

3.16. Pelaksanaan Kebijakan Negara

- Hanya sebagian kecil kebijakan yang bersifat self-executing, artinya dengan telah dirumuskan kebijakan, sekaligus kebijakan telah terimplementasikan. Umumnya memerlukan tindak lanjut yang panjang dan melibatkan banyak pihak agar suatu kebijakan bisa terimplementasikan.
- Umumnya suatu kebijakan diperlukan waktu sosialisasi sebelum diimplementasikan
- Di negara berkembang, produk kebijakan relatif jauh lebih banyak dibanding negara maju → negara maju lebih berpengalaman untuk hanya membuat sedikit kebijakan, tetapi pelaksanaannya berhasil dibanding banyak membuat kebijakan tetapi tidak terimplementasikan

3.17. Kategori Kebijakan Negara

- a. **Substantive** (misal kebijakan luar negeri, kebijakan energi dll) vs Procedural Policies (misal Prosedur Pembuatan Undang-Undang)
- b. **Distributive** (misal kebijakan pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa yg memilih jurusan langka, pemberian tax-holiday bagi perusahaan baru) vs Re-distributive (misal pemberian dana kesejahteraan sosial)
- c. **Regulatory** (misal larangan menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api) vs Self Regulatory Policies (misal pemberian SIM dan KTP)
- d. **Material** (misal kewajiban UMR) vs Symbolic Policies (misal larangan menginjak rumput di taman)
- e. **Collective goods** (misal kebijakan pengadaan 9 bahan pokok) vs private goods policies (misal penyediaan taman oleh real estate)

- f. **Liberal** (kebijakan menghendaki adanya koreksi terhadap aturan-aturan sosial yang sudah baku secara cepat) vs conservative policies (perubahan sosial hanya bisa berjalan secara lambat dan alamiah)

3.18. Syarat Terlaksananya Kebijakan

- Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan kebijakan badan-badan pemerintah
- Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- Adanya keyakinan bahwa kebijakan telah dibuat secara sah, konstitusional dan melalui prosedur yang benar
- Adanya kepentingan anggota kelompok yang sesuai dengan kebijakan
- Adanya penalti bila tidak melaksanakan kebijakan
- Perlu waktu sampai dengan terimplementasikan

Hal-hal yang menghambat

- Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat
- Adanya konsep ketidak-patuhan selektif terhadap hukum
- Keanggotaan seseorang dalam perkumpulan atau kelompok
- Keinginan untuk mencari untung dengan cepat
- Adanya ketidak pastian hukum

3.19. Penilaian Kebijakan Negara

- Suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah
 - Dari sudut spesifikasi obyek: penilaian apakah program pemerintah sudah bisa menyelesaikan problema di masyarakat. Misal kebijakan kesehatan, tenaga kerja dll
 - Dari sudut teknik penilaian: cara menilai secara scientific systematic (dilakukan dengan melakukan penelitian mendalam) vs impressionistis (hanya berdasar observasi sekilas, yang penting menimbulkan kesan-kesan)
 - Dari sudut metode analisa. Penilaian apakah suatu kebijakan telah efektif. Apakah dampak positifnya lebih besar dibanding dampak negatifnya

Pihak Yang Menilai

- Penilaian oleh Pembuat kebijakan
 - Seringkali bersifat politis dan mempunyai kecenderungan tertentu (value laden). Kriteria pribadi, ideologi dsb sering mempengaruhi obyektifitas penilaian.
- Penilaian oleh unsur di luar pemerintah

- Penilaian berdasar penglihatan mereka terhadap pelaksanaan nyata dan konsekuensi yang mengiringi implementasi kebijakan tersebut. Bersifat clear-cut evaluation.
 - Penilaian oleh kelompok/partai politik yang kalah: sama dengan penilaian oleh pembuat kebijakan. Seringkali bersifat politis dan mempunyai kecenderungan tertentu (value laden). Kriteria pribadi, ideologi dsb sering mempengaruhi obyektifitas penilaian
 - Penilaian oleh pihak netral: terlihat apakah sudah menggunakan teknik penilaian yang obyektif, scientific dan systematic evaluation.

3.20. Dimensi Dampak Kebijakan Negara

- Dampak yang diharapkan vs yang tidak diharapkan.
 - Harus ditentukan dahulu kebijakan ditujukan kepada siapa
- Limbah kebijakan: externalities atau spillover effects. Bisa bersifat negatif misal pengembangan senjata nuklir. Ada yang mempunyai limbah positif, misal kebijakan penurunan tarif /biaya ekspor yang tujuannya untuk meningkatkan ekspor, berdampak penurunan harga dalam negeri, karena impor juga ikut naik.
- Dampak sekarang vs dampak masa yang akan datang
- Dampak berupa direct cost vs social cost
- Dampak berupa indirect cost
- Kebijakan yang tidak berdampak apa-apa

3.21. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Kebijakan

- Keterbatasan sumber daya
- Kesalahan administrasi kebijakan
- Perumusan kebijakan hanya melibatkan sedikit dari banyak faktor timbulnya public problems.
- Pelaksanaan tidak sesuai petunjuk pelaksanaan
- Adanya kebijakan negara yang bertentangan satu sama lain
- Biaya implementasi kebijakan lebih besar dibanding biaya yang hilang karena masalah yang ingin dipecahkan oleh kebijakannya sendiri.
- Public problems yang memang tidak/belum mungkin dipecahkan sekarang
- Sifat permasalahan berubah, saat akan diimplementasikan dibanding saat kebijakan masih akan dirumuskan
- Adanya masalah baru yang lebih menarik perhatian masyarakat

3.22. Sistem Nilai dan Kebijakan Negara

- Sistem Nilai sangat berpengaruh dalam kebijakan negara, baik ketika dirumuskan maupun ketika diimplementasikan dan dinilai
- Apakah sistem nilai bangsa Indonesia sekarang???

3.23. Soal soal dalam bidang Telekomunikasi:

Jawaban bukan Copy Paste dari internet!!!

1. Analisalah, bagaimana anda akan memasukkan unsur "*kepentingan public*" yang merupakan falsafah dasar penyusunan regulasi dan kebijakan jaringan dan jasa telekomunikasi dalam bidang:
 - a. Penentuan jumlah operator pemegang lisensi jasa dan jaringan telekomunikasi
 - b. Penentuan Pricing dari layanan telekomunikasi
 - c. Investment dari perusahaan pemegang lisensi telekomunikasi
 - d. Penentuan Kapasitas jaringan dan jasa telekomunikasi
 - e. Penentuan Kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi
 - f. Jenis layanan dan jaringan telekomunikasi
2. Discuss the telecommunications engineering ITB students body as follows:

According to Frank J. Goodnow. Government has two distinct functions: (a) political function: the formulation of state policies and (b) administrative functions: the implementation of the State policy. If the analogy IMT Signum as a "state" within the meaning of ITB telecommunication engineering student community. Mention briefly how the function of political and administrative functions executed by IMT Signum ITB.

 - a. Ronald J. Schmidt and George Frederick Goerl (1980): Stressing on the importance of political education for public administrators so that they become a public-spirited citizen-which is more sensitive and is always oriented to the public interest. Who is referred to as the public in relation to IMT Signum?
 - b. Mention two main factors that become obstacles in your activities in student-body. Select 2 of five factors that theoretically influence policy making: The influence of pressure from the outside, The influence of old habits (conservatism), The influence of a personal nature, The influence of outside groups, and the existence of past state influence
 - c. Write down three examples of student activities that can improve student outcomes ITB graduate department of telecommunications engineering are each associated with one of the ABET accreditation criteria. NB. ABET accreditation criteria mentioned that: *For associate degree programs, these student outcomes must include, but are not limited to, the following learned capabilities: a. an ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to narrowly defined engineering technology activities; b. an ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to engineering technology problems that require limited application of principles but extensive practical knowledge; c. an ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments; d. an ability to function effectively as a member of a technical team; e. an ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems; f. an ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and nontechnical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature; g. an understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development; h. an understanding of and a commitment to address professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity; and i. a commitment to quality, timeliness, and continuous improvement.*
3. **Soal UTS ET 4040 Semester 1 2017/2018; Tanggal 9 Oktober 2017**

Soal nomor 11 s/d 15 adalah menentukan model perumusan kebijakan yang paling tepat

- (11) Menentukan jumlah operator pemegang lisensi jasa dan jaringan telekomunikasi (apakah cukup satu operator saja, cukup dua, maksimal tiga, atau tidak terbatas). Jika misalnya ini dominan merupakan factor ekonomi
- (12) Menentukan jumlah operator pemegang lisensi jasa dan jaringan telekomunikasi (apakah cukup satu operator saja, cukup dua, maksimal tiga, atau tidak terbatas). Jika misalnya ini dominan merupakan factor teknologi
- (13) Penentuan Pricing dari layanan telekomunikasi (apakah dibiarkan operator bebas menentukan tariff langganan, ataukah pemerintah menentukan tariff, atau pemerintah dan operator bersama menentukan tariff). Jika misalnya ini merupakan kombinasi factor ekonomi dan sosial
- (14) Penentuan investment dari perusahaan pemegang lisensi telekomunikasi (apakah harus 100 % investor dalam negeri, atau investor asing boleh tapi maksimum 49 %, atau investor boleh 100 % menguasai saham operator). Misalnya ini dominan merupakan factor politik
- (15) Penentuan Kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi (apakah operator telekomunikasi boleh bebas menentukan kualitasnya, atau pemerintah yang menentukan kualitas layanan, atau pemerintah bersama operator menentukan kualitas layanan). Misal dominan factor teknologi

DAFTAR PUSTAKA:

- [1] Irfan Islamy. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- [2] Sigit Haryadi. (2015). Catatan Kuliah Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi. Program Studi Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung.
- [3] Sigit Haryadi. (January 2017). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara. Researchgate, DOI10.13140/RG.2.2.17102.25927. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/313432859_Ekonomi_Bisnis_Regulasi_dan_Kebijakan_Telekomunikasi_Prinsip_Penyusunan_Kebijakan_Negara
- [4] Sigit Haryadi. (March 2017). Catatan Kuliah "Overview Organisasi Regulasi Telekomunikasi". Researchgate, DOI10.13140/RG.2.2.34928.05122. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/314939825_Catatan_Kuliah_Overview_Organisasi_Regulasi_Telekomunikasi
- [5] Sigit Haryadi. (March 2017). Catatan Kuliah Lisensi Provider dan Operator Telekomunikasi. Researchgate, DOI10.13140/RG.2.2.13117.67046. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/314938861_Catatan_Kuliah_Lisensi_Provider_dan_Operator_Telekomunikasi
- [6] Sigit Haryadi. (January 2017). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip-Prinsip Ilmu Hukum. Researchgate, DOI10.13140/RG.2.2.30524.03207. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/313159546_Ekonomi_Bisnis_Regulasi_dan_Kebijakan_Telekomunikasi_Prinsip-Prinsip_Ilmu_Hukum